SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6944);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaran urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan dan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan unsur Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan.

9. Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16. Utang Daerah yang selanjutnya disebut dengan Utang adalah uang yang wajib dibayar oleh Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-udangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
17. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-udangan atau akibat lainnya yang sah.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran pembangunan Daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
20. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program kebijakan.
21. Sasaran adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.551.696.111.599 (satu triliun lima ratus lima puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp119.719.219.050 (seratus sembilan belas miliar tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan belas ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

   a. pajak daerah;

   b. retribusi daerah;

   c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

   d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.904.935.539 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.111.177.770 (lima belas miliar seratus sebelas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.423.105.741 (lima puluh delapan miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.280.000.000 (dua miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncananakan sebesar Rp1.394.744.041.639 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat;

b. pendatan transfer antar daerah;

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.361.865.181.000 (satu triliun tiga ratus enam puluh satu miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.878.860.639 (tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncananakan sebesar Rp37.232.850.910 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.615.016.111.599 (satu triliun enam ratus lima belas miliar enam belas juta seratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.190.466.894.185 (satu triliun seratus sembilan puluh miliar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja hibah;

d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp727.365.110.335 (tujuh ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp410.262.544.466 (empat ratus sepuluh miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.796.511.802 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus dua rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncakan sebesar Rp3.042.727.582 (tiga miliar empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp154.150.100.952 (seratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh juta seratus ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal peralatan dan mesin;

b. belanja modal gedung dan bangunan;

c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;

d. belanja modal aset tetap lainnya;

e. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.240.603.894 (tiga puluh satu miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).

(3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.093.578.000 (tiga puluh tujuh miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

(4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.177.572.058 (tujuh puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh delapan rupiah).

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.418.347.000 (sepuluh miliar empat ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

(6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp265.399.116.462 (dua ratus enam puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil;

b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.906.113.000 (lima miliar sembilan ratus enam juta seratus tiga belas ribu rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp259.493.003.462 (dua ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp63.320.000.000 (enam puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan;

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp73.320.000.000 (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

(2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 14

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp63.320.000.000 (enam puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp63.320.000.000 (enam puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 15

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2.	Lampiran II	Penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3.	Lampiran III	Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
4.	Lampiran IV	Daftar nama perima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial;
5.	Lampiran V	Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan khusus;
6.	Lampiran VI	Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil;
7.	Lampiran VII	Rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rician objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8.	Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambagan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9.	Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
10.	Lampiran X	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 16

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd

DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd

SOFYAN ADIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 1235

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN SETDA

PARLAUNGAN DALIMUNTHE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196907211998031004

Lampiran I : Peraturan Bupati Tapanuli Selatan
Nomor : 32 TAHUN 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**119.719.219.050,00**
4.1.01	Pajak Daerah	43.904.935.539,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	140.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	115.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	115.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	225.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	225.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	225.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.035.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	6.035.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	6.035.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.150.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	2.150.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.150.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	200.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	200.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	200.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	18.623.520.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	7.065.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	215.000.000,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	6.850.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	11.356.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	11.256.000.000,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	100.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	195.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	150.000.000,00
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	45.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	3.520.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	3.520.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	4.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	4.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.973.836.795,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	6.973.836.795,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	6.973.836.795,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	9.557.578.744,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	9.557.578.744,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	9.557.578.744,00
4.1.02	Retribusi Daerah	15.111.177.770,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	13.228.802.770,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	11.879.153.520,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	11.879.153.520,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	163.227.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	163.227.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	125.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	125.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.061.422.250,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	234.624.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	175.078.750,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	651.719.500,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.162.375.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	659.700.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	226.000.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	433.700.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.200.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.200.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	5.500.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	5.500.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	80.000.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	80.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	87.550.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	87.550.000,00
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	9.975.000,00
4.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	9.975.000,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	318.450.000,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	318.450.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	720.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	450.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	450.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	270.000.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	270.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	58.423.105.741,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	58.423.105.741,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	52.063.105.741,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	52.063.105.741,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	6.000.000.000,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	6.000.000.000,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	360.000.000,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	360.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.280.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.280.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.280.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.280.000.000,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.394.744.041.639,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.361.865.181.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	159.313.559.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	159.313.559.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	159.313.559.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.311.671.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.311.671.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.311.671.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	268.928.642.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	64.916.003.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	48.543.501.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	15.496.323.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	450.000.000,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	426.179.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	200.579.195.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	12.330.000,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	1.075.167.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	198.174.031.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	405.899.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	911.768.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	3.433.444.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	3.433.444.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	703.746.762.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	494.117.025.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	494.117.025.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	209.629.737.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	7.400.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	33.035.017.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	66.585.302.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	48.831.464.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	53.777.954.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	222.564.547.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	41.285.382.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	759.934.000,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	374.816.000,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	12.840.000.000,00
4.2.01.09.01.0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	313.614.000,00
4.2.01.09.01.0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	26.997.018.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	181.279.165.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	43.759.954.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.817.500.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	93.941.840.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.585.000.000,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	6.548.753.000,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	45.000.000,00
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	7.469.800.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.019.220.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	105.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.109.090.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.021.171.000,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	549.414.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	14.307.423.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.878.860.639,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	32.878.860.639,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	32.878.860.639,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.124.003.203,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.103.221.348,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	22.651.636.088,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**37.232.850.910,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	20.824.800.000,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	20.824.800.000,00
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	20.824.800.000,00
4.3.01.04.03.0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	20.824.800.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.408.050.910,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14.928.050.910,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14.928.050.910,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14.928.050.910,00
4.3.03.05	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi	500.000.000,00
4.3.03.05.01	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi	500.000.000,00
4.3.03.05.01.0001	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi	500.000.000,00
4.3.03.06	Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi	980.000.000,00
4.3.03.06.01	Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi	980.000.000,00
4.3.03.06.01.0001	Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi	980.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	**1.551.696.111.599,00**
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.190.466.894.185,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	727.365.110.335,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	487.969.956.447,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	357.738.574.246,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	220.553.188.846,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	137.185.385.400,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	35.492.381.666,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	20.868.244.774,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14.624.136.892,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.957.021.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.957.021.000,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.791.426.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.742.381.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6.049.045.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.516.415.280,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.107.352.280,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.409.063.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	22.367.753.512,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.896.762.760,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.470.990.752,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.353.610.000,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.261.766.000,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	91.844.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	190.914.779,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	129.234.779,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	61.680.000,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	25.716.859.964,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.716.859.964,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.000.000.000,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.120.000.000,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	690.000.000,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	430.000.000,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.350.000.000,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.100.000.000,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.250.000.000,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.375.000.000,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.450.000.000,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	925.000.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	218.207.398.495,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	75.366.846.848,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	75.366.846.848,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	9.357.600.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	9.357.600.000,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	133.482.951.647,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	7.000.000,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	11.250.000,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	107.500.000,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	10.000.000,00
5.1.01.02.06.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	300.000.000,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	918.568.899,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	387.277.602,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	258.779.366,00
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	504.598.664,00
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	8.161.350,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.250.000,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	53.081.112,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	33.040.000,00
5.1.01.02.06.0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	60.000,00
5.1.01.02.06.0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	275.000,00
5.1.01.02.06.0040	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	4.000.000,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	498.750,00
5.1.01.02.06.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.922.500,00
5.1.01.02.06.0045	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.377.500,00
5.1.01.02.06.0047	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	13.500.000,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	22.500.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	103.554.660.500,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	7.242.185.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.062.250.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	16.036.965.804,00
5.1.01.02.06.0070	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	688.055.600,00
5.1.01.02.06.0071	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	369.444.000,00
5.1.01.02.06.0072	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	862.750.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.233.090.393,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.943.200,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.943.200,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	118.206.900,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	118.206.900,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	43.299.900,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	43.299.900,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.174.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.174.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.543.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.543.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	64.703.096,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	64.703.096,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	11.000.000,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	11.000.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.423.132.461,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	127.711.381,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	49.700.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	77.721.080,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.168.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.566.400.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.566.400.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	54.389.236,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	54.389.236,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	178.185.000,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.112.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.112.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.400.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.400.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	700.000,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	700.000,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.000.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	369.000,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	369.000,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.080.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.080.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	776.480.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	464.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	464.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.262.544.466,00
5.1.02.01	Belanja Barang	121.891.416.557,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	120.006.972.633,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	350.547.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	929.780.800,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	778.160.300,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	762.387.700,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	324.020.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	701.328.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	549.514.500,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	101.613.700,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1.674.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.960.508.169,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.995.946.839,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	768.877.114,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	216.220.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.149.471.440,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.597.498.985,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.171.551.449,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	468.131.600,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.880.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	619.991.400,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.461.316.571,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.168.579.450,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	13.257.226.972,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	46.991.591.094,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	100.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.560.436.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	282.535.500,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.253.177.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.219.627.350,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	274.278.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	55.000.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.284.022.500,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.402.578.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	199.721.400,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	387.233.600,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	341.000.000,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	624.284.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	300.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	925.520.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	120.537.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	247.626.500,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	400.278.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	40.000.000,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	40.000.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.844.443.924,00
5.1.02.01.04.0035	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	115.260.000,00
5.1.02.01.04.0036	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.094.514.924,00
5.1.02.01.04.0104	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	37.000.000,00
5.1.02.01.04.0106	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	16.859.000,00
5.1.02.01.04.0116	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	74.833.900,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	68.464.800,00
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	194.744.700,00
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	56.212.800,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	4.856.200,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	42.905.400,00
5.1.02.01.04.0125	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0,00
5.1.02.01.04.0323	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	9.292.200,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.04.0405	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.500.000,00
5.1.02.01.04.0406	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	21.000.000,00
5.1.02.01.04.0451	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	45.000.000,00
5.1.02.01.04.0545	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	60.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	158.465.991.039,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	85.613.543.375,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	507.494.400,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.025.080.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	769.062.500,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	532.200.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	3.410.100.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	11.600.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	241.000.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	597.900.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	9.521.100.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.085.414.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	498.400.500,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	238.100.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.675.800.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	588.000.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	382.200.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	43.500.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	819.000.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	466.200.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.094.950.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	143.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.405.255.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.583.500.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.133.800.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.529.650.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.157.640.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.169.100.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.386.480.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	173.600.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	420.389.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	101.890.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	734.050.000,00
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	127.800.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	34.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	70.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	50.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	87.000.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	310.000.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	3.655.370.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	87.180.103,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.026.360.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	146.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	239.841.902,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.701.392.044,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	930.776.092,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.261.672.298,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	31.717.500,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	718.602.441,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	9.514.945.595,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	200.000.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	450.000.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.254.700.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.270.730.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	50.978.971.402,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.065.845.200,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	40.565.183.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	200.000.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.207.610.690,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.690.932.512,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	70.000.000,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	3.179.400.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.360.318.300,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	30.000.000,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	396.750.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	31.600.000,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	45.950.600,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	71.906.400,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	5.707.611.300,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	17.500.000,00
5.1.02.02.04.0464	Belanja Sewa Alat Peraga Percontohan	29.000.000,00
5.1.02.02.04.0465	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.252.260.562,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	317.517.108,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	572.643.454,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	285.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.077.100.000,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	350.000.000,00
5.1.02.02.06.0048	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	350.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	367.670.400,00
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	352.670.400,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.935.000.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	495.000.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.220.000.000,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	300.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	400.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	2.530.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	390.000.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	400.000.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	200.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	205.000.000,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	105.000.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	100.000.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	100.000.000,00
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	100.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	150.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	150.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.153.227.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.930.040.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	72.481.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	3.894.280.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	256.426.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	17.428.759.514,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	53.500.000,00
5.1.02.03.01.0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	53.500.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.006.346.677,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	150.000.000,00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	82.910.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	150.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	115.810.000,00
5.1.02.03.02.0027	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	220.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.839.689.400,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	554.587.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	82.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.340.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	60.000.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	205.000.000,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	15.000.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	50.692.677,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	468.000.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	155.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	224.382.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	31.944.800,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	220.000.000,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	654.400.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	100.033.200,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	27.060.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	270.959.800,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.115.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	214.422.800,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.068.912.837,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.010.965.338,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	162.000.000,00
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	280.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.287.947.499,00
5.1.02.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	280.000.000,00
5.1.02.03.03.0053	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	48.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.300.000.000,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	700.000.000,00
5.1.02.03.04.0119	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	100.000.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	500.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	77.159.316.600,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	76.984.316.600,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.978.921.600,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.878.895.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	116.000.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.500.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	175.000.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	175.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.104.005.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.604.965.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.836.065.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	140.250.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.000.000.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	46.000.000,00
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	260.250.000,00
5.1.02.05.01.0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	1.322.400.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.499.040.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	606.000.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.893.040.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	27.213.055.756,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	26.975.305.756,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	26.975.305.756,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	237.750.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	237.750.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	49.796.511.802,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	23.500.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.700.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.700.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	21.800.000.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	21.800.000.000,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	6.000.000.000,00
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	6.000.000.000,00
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	6.000.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	16.212.978.900,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.277.013.900,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.277.013.900,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.943.910.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.943.910.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.992.055.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.511.200.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.480.855.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	2.799.080.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.799.080.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.799.080.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.284.452.902,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.284.452.902,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.284.452.902,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.042.727.582,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.135.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.135.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.135.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	707.727.582,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	707.727.582,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	707.727.582,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	200.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	200.000.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	200.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**154.150.100.952,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.240.603.894,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	49.250.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	48.000.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	48.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.250.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	1.250.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	6.850.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.850.000.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.850.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0,00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.344.865.082,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	953.106.376,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	239.400.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	713.706.376,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.264.005.350,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.527.208.550,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	157.500.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	100.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	437.296.800,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	42.000.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	127.753.356,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	32.000.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	95.753.356,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	456.497.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	456.497.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	444.497.000,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	12.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	745.950.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	369.950.000,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	369.950.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	376.000.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	376.000.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.583.394.500,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.666.000.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	1.095.000.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	571.000.000,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	35.700.000,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	35.700.000,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	2.881.694.500,00
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	2.881.694.500,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	10.100.351.168,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	6.194.205.768,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	127.485.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	50.000.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	6.016.720.768,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.906.145.400,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	21.500.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.884.645.400,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	48.108.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	48.108.000,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	48.108.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	325.402.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	325.402.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	325.402.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	3.736.786.144,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	3.703.876.144,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	3.703.876.144,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	32.910.000,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	32.910.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.093.578.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	34.277.578.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	34.277.578.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.017.202.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	14.675.000.000,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	600.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	17.433.376.000,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	125.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	277.000.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	150.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.816.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.816.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	2.816.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.177.572.058,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	52.797.250.200,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	46.001.150.200,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	46.001.150.200,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	6.796.100.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	6.455.060.000,00
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	341.040.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	6.457.202.858,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.347.657.000,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.347.657.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	5.109.545.858,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	5.109.545.858,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	50.000.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	50.000.000,00
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	50.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	15.873.119.000,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	9.798.119.000,00
5.2.04.04.01.0001	Belanja Modal Jaringan Pembawa	9.798.119.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	6.075.000.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	6.075.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.418.347.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	134.264.900,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	110.069.600,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	106.140.400,00
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat	3.519.200,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	410.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	24.195.300,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	24.195.300,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	10.284.082.100,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	10.281.692.100,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	10.281.692.100,00
5.2.05.89.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	2.390.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.89.02.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	2.390.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	220.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	220.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	220.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	220.000.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**265.399.116.462,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.906.113.000,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.394.885.000,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.394.885.000,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.394.885.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.511.228.000,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.511.228.000,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.511.228.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	259.493.003.462,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	259.493.003.462,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	259.493.003.462,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	259.493.003.462,00
	Jumlah Belanja	**1.615.016.111.599,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**-63.320.000.000,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**73.320.000.000,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	73.320.000.000,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	3.210.000.000,00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	2.590.000.000,00
6.1.01.01.01.0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	60.000.000,00
6.1.01.01.01.0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.400.000.000,00
6.1.01.01.01.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	50.000.000,00
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	30.000.000,00
6.1.01.01.01.0019	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.050.000.000,00
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	620.000.000,00
6.1.01.01.04.0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	60.000.000,00
6.1.01.01.04.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga	100.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01.01.04.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	460.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	70.110.000.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	60.390.000.000,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	20.254.000.000,00
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	20.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	200.000.000,00
6.1.01.05.01.0006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	200.000.000,00
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	57.410.500,00
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	13.910.876.828,00
6.1.01.05.01.0011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	857.375.300,00
6.1.01.05.01.0021	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	410.337.372,00
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.500.000.000,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	7.320.000.000,00
6.1.01.05.02.0002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	43.100.000,00
6.1.01.05.02.0003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	624.000.000,00
6.1.01.05.02.0004	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.000.000,00
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	652.000.000,00
6.1.01.05.02.0007	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	100.000.000,00
6.1.01.05.02.0011	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	700.000.000,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	5.191.900.000,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	2.400.000.000,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	2.400.000.000,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**10.000.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**10.000.000.000,00**
	Pembiayaan Netto	**63.320.000.000,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

BUPATI TAPANULI SELATAN

DOLLY PASARIBU